

JURNAL

**PENERAPAN KEBIJAKAN SOLUSI PASIFIK OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA
DALAM MENGENDALIKAN LAJU KEDATANGAN PENGUNGSI DAN PENCARI
SUAKA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**



Diajukan Oleh :

HARYO PRADIPTA BAYUWEGA

NPM

: 110510671

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

**: Hukum tentang Hubungan
Internasional**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**PENERAPAN KEBIJAKAN SOLUSI PASIFIK OLEH PEMERINTAH
AUSTRALIA DALAM MENGENDALIKAN LAJU KEDATANGAN PENGUNSI
DAN PENCARI SUKA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**



Diajukan Oleh :

HARYO PRADIPTA BAYUWEGA

NPM	: 110510671
Program Study	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 6 Juli 2015

H.Untung Setyardi, S.H., M.Hum

Tanda Tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta,



FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

**PENERAPAN KEBIJAKAN SOLUSI PASIFIK OLEH PEMERINTAH
AUSTRALIA DALAM MENGENDALIKAN LAJU KEDATANGAN
PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DITINJAU DARI HUKUM
INTERNASIONAL**

Haryo Pradipta Bayuwega, H. Untung Setyardi

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

The title of this research is the application of Pacific Solution policy by Australia's government in controlling the arrival rate of refugees and asylum seekers in terms of international law. Refugees and asylum seekers are usually caused by prolonged conflict in a country so that they do not feel safe staying in their home country and in the state persecution. Refugees and asylum seekers seeking refuge in safer countries and to fulfill the rights needed. Australia is one of the destination countries for refugees and asylum seekers get the protection, besides because Australia has been ratified Geneva Convention 1951, Australia also has a good quality of life. But the Australian government seems began to interfere with the predicate attached to the country, therefore in 2001 the Australian government issued a policy which called as Pacific Solution. Based on that case then this research aims to determine whether the implementation of the Pacific Solution are appropriate if it reviewed by the terms of international law. This research uses normative juridical type, juridical research means research which focused to norm, included international agreements which have relevance with the issue. This research also needs secondary data in form of legal materials obtained from verbal or written opinion from the expertise or the authorities and other source which has relevance with the issue written. In fact Australia as the country

which has ratified Jenewa Convention 1951, in applicating the Pasific Solution to control arrival rate of refugees and asylum seekers is not appropriate to international law, especially which related to Jenewa Convention 1951, chapter 14 of Universal Declaration of Human Rights, United Nations declaration on Territorial Asylum and international custom.

Keywords: Australia, Pasific Solution, Refugee, Asylum Seeker

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Perebutan wilayah kekuasaan, perang saudara dan pemberotakan terhadap pemerintah di negara sendiri membuat penduduk negara menjadi tidak nyaman dan aman, menjadi sasaran kekerasan, pengeboman disana-sini, penembakan disetiap sudut kota jelas membuat penduduk ketakutan, mereka merasa negaranya bukan menjadi tempat aman untuk tempat tinggal, mereka sewaktu-waktu dapat terbunuh dan negara tidak dapat lagi melindungi keselamatan mereka di dalam keadaan konflik. Hal itulah yang mendorong mereka untuk keluar dari negaranya dan mencari perlindungan dan tempat tinggal yang lebih baik, dimana mereka dapat hidup dengan aman dan negara dapat menjamin keselamatan mereka. Oleh karena itu banyak penduduk dari negara yang berkonflik tersebut meninggalkan negaranya demi mengungsi dan mencari Suaka di negara lain.

Australia adalah Negara yang banyak dipilih menjadi tujuan para pencari suaka. Sejak abad ke 19 Australia telah menjadi Negara tujuan bagi para

Imigran diseluruh dunia. Dan imigran-imigran itulah yang kemudian menjadi penduduk Australia hingga saat ini.¹ Para pengungsi dan pencari suaka ini kebanyakan berasal dari Negara-Negara Asia dan Timur Tengah. Afghanistan, Sri Lanka, Vietnam, Pakistan, Irak dan Nigeria, biasanya menjadi mayoritas imigran yang mendatangi Australia. Australia dinilai netral didalam memberikan suaka, mereka juga beranggapan Australia menjadi tempat yang baik didalam memberikan jaminan hidup kepada para imigran. Informasi dari kerabat yang telah berhasil mendapatkan suaka di Australia semakin memotivasi mereka untuk bisa mendapatkan suaka tersebut. Mereka tidak tahan lagi tinggal di Negeranya karena pemerintah tidak dapat memberikan jaminan, sedangkan Australia dapat memberikan jaminan tersebut. Penyebab utama yang menarik hati para pencari suaka dan pengungsi untuk datang ke Australia adalah kualitas hidup yang terjamin, Sistem pendidikan, pendapatan dan karir di Australia mencetak nilai tertinggi jika dibandingkan negara-negara lain di dunia.² Gaya hidup dan kualitas hidup di Australia juga merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Beberapa ibukota Australia selalu masuk peringkat kota-kota ‘yang paling layak huni’ di dunia. Survei biaya hidup 2008 dari Mercer Human Resource Consulting menunjukkan bahwa hanya dua kota Australia, Sydney di peringkat 15 dan Melbourne di peringkat 36, yang muncul di daftar 50 kota termahal untuk dihuni selain dua kota yang

¹http://www.academia.edu/4691963/Australia_Surga_Pencari_Suaka, diakses pada tanggal 1 september 2014.

²<http://www.keeponline.com/hot-news-channel/10-Negara-hunian-terbaik-di-2014>, di akses pada tanggal 11 september 2014

telah disebutkan tadi biaya hidup di kota-kota Australia termasuk rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal –hal tersebut jelas menimbulkan keinginan dari para pencari suaka dan pengungsi untuk mendapatkan perlindungan dari Australia dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang menginginkan untuk menjadi warga Negara Australia dan meninggalkan negaranya yang selalu terjadi konflik yang berkepanjangan dan keamanan sangat-sangat di khawatirkan. Jika dilihat dari sejarahnya sejak Perang Dunia II, lebih dari 700 ribu pengungsi telah ditampung di Australia. Hal tersebut menyebabkan banyaknya para pencari suaka datang ke Australia, dan gelombang datangnya para pengungsi dan pencari suaka tersebut dinilai telah melampaui batas sehingga Australia mulai kewalahan dengan adanya gelombang para pengungsi dan pencari suaka asing yang melampaui batas untuk mencari perlindungan di negaranya. Setiap tahun Australia menerima sedikitnya 13.500 orang pengungsi.³ Namun sangatlah disayangkan tindakan Australia didalam mengatur banyaknya para pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke dalam negaranya diluar kewajaran bahkan tidak manusiawi.

Australia selalu melakukan upaya-upaya untuk dapat mencegah dan mengendalikan laju kedatangan para pengungsi dan pencari suaka yang hendak datang ke Negaranya, banyak dari upaya-upaya tersebut justru menimbulkan korban di pihak pengungsi dan pencari suaka, salah satu upaya Australia untuk mengendalikan ledakan pengungsi dan para pencari suaka di

³<http://www.antaranews.com/berita/164826/australia-terus-diserbu-pencari-suaka>, di akses pada tanggal 11 september 2014

negaranya adalah dengan cara Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang bernama Solusi Pasifik (*pacific solution*), Solusi Pasifik dilaksanakan pada Tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 pada saat Perdana Menteri John Howard menguasai jalannya roda pemerintahan. Solusi Pasifik Sendiri adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Australia untuk mengalihkan Arus pencari suaka dan pengungsi dengan cara menampung para pencari suaka tersebut di Negara-Negara Pasifik seperti Papua Nugini, Nauru dan Pulau Manus agar para pencari suaka tersebut yang sebagian besar adalah pengungsi tersebut tidak dapat masuk secara langsung ke Australia. Kebijakan Pemerintah Australia dengan mengeluarkan Solusi Pasifik ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, karena Pemerintah Australia dinilai melanggar Hak Asasi Manusia dan Hak-hak pengungsi karena penanganan yang dianggap tidak profesional dan tidak sesuai dengan standar Internasional didalam penanganannya, seperti tidak adanya jaringan air bersih, tidak adanya tempat penampungan yang layak serta perlakuan yang kurang manusiawi terhadap para pengungsi tersebut.

Jika ditinjau dari Hukum Pengungsi Internasional tentu saja hal ini dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap asas *Non Refoulment*, *Non Expulsion*, *Rejection at the Frontiers*, dan *Asylee*, serta ketentuan hukum pengungsi internasional yang terkandung di dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protocol New York 1967 tentang Status Pengungsi Internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas ,maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah penerapan kebijakan Solusi Pasifik oleh Pemerintah Australia dalam mengendalikan laju kedatangan Pengungsi dan Pencarisuaka ditinjau dari hukum Internasional?

II. Pembahasan

A. Pengertian Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka

1. Pengertian Pengungsi Internasional

Pengaturan dan pengertian pengungsi internasional diatur didalam instrumen-instrumen internasional, dalam instrumen tersebut diatur segala sesuatunya tentang pengungsi internasional termasuk hak dan kewajiban dari pengungsi internasional tersebut serta perlindungannya. Berikut Pengertian pengungsi Internasional menurut Instrumen Internasional :

a. Konvensi Jenewa 1951

Dalam pasal 1 Konvensi Jenewa 1951 memberikan definisi sebagai berikut:

“Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan

ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada diluar Negara kewarganegaraanya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan Negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewargaNegaraan dan berada di luar Negara di mana sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke Negara itu”.⁴

b. Statuta UNHCR

Dalam Statuta UNHCR terdapat pengertian pengungsi, Pengertian tersebut terdapat dalam pasal 6 A dan 6 B.

1) Pasal 6 A (i) Statuta UNHCR:

“Any person who has been considered a refugege under the Arrangements of 12 may 1962 and of 30 june 1928 or under Conventions of 28 october 1933 and 10 february 1938, the protocol of 14 september 1939 or the Constitution of the international refugee organization.”⁵

2) Pasal 6 A (ii) Statuta UNHCR:

“Any person who, as a result of events occuring before 1 january 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reason of race, religion, nationality or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear or for reason other than personal conveenience, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having anationality and being outside the country of his former habitual residence, is unable or, owing to such fear or for reason other than personal convenience is unwilling to return to it.”⁶

⁴Konvensi jenewa 1951 tentang status pengungsi internasional Pasal 1

⁵Statuta UNHCR pasal 6 A (i)

⁶Statuta UNHCR pasal 6 A (ii)

3) Pasal 6 B Statuta UNHCR:

“Any other person who is outside the country of his nationality, or if he has no nationality, the country of his former habitual residence, because he has or had well-founded fear of persecution by reason of his race, religion, nationality or political opinion and is unable or because of such fear, is unwilling to avail himself of the protection of the government of the country of his nationality, or if he has no nationality, to return to the country of his former habitual residence.”⁷

4) Protokol New York 1967

Dalam Protokol New York 1967 yang dimaksud dengan pengungsi terkandung dalam pasal 1 ayat 2.

“Untuk maksud Protokol ini, istilah pengungsi, kecuali mengenai pelaksanaan ayat 3 pasal ini akan berarti tiap orang yang termasuk dalam definisi pasal 1 Konvensi seakan-akan kata-kata “sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan..” sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud”, dalam pasal 1A(2) ditiadakan”.⁸

Dimaksudkan disini adalah definisi pengungsi yang terdapat pada pasal 1 Konvensi Jenewa 1951 mendapat beberapa perubahan dimaksudkan agar definisi pengungsi menjadi lebih luas. Perubahan tersebut menjadi seperti berikut:

Pengungsi adalah orang yang karena ketakutan yang beralasanakan menerima penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial

⁷Statuta UNHCR pasal 6 B

⁸Protokol New York 1967 Pasal 1 ayat 2

tertentu atau pendapat politiknya, berada di luar Negaranya dan tidak dapat, dikarenakan ketakutan tersebut, atau tidak ingin untuk memperoleh perlindungan dari Negara tersebut; atau seseorang yang tidak mempunyai kewargaNegaraan dan berada di luar Negara tempatnya menetap sebagai akibat dari peristiwa tertentu, tidak dapat, atau dikarenakan ketakutannya tersebut, tidak ingin kembali ke negaranya.

5) Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tahun 1967 Tentang Asilum Teritorial (UN. Declaration on Territorial Asylum 1967).

Dalam Deklarasi Suaka Territorial tahun 1967 ini memperluas efektifitas perlindungan internasional terhadap para pengungsi. Perlindungan itu dimaksudkan untuk mengembangkan instrumen hukum internasional untuk para pengungsi dan juga untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan sesuai dengan instrumen-instrumen khususnya yang berkaitan dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial, serta akses terhadap dokumen perjalanan. UN Declaration On Territorial Asylum 1967 ini hanya terdiri dari 4 pasal. Deklarasi ini, di bagian Pembukaan merujuk kepada pasal 14 Universal Declaration of Human Right yang menyatakan bahwa:⁹

⁹Acmad Romsan, Op Cit. Hal 43

- 1) *Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.*
- 2) *This right may not be revoked in the case of persecutions genuinely arising from non political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.*¹⁰

Deklarasi tahun 1967 juga merujuk kepada pasal 13 ayat 2 dari Universal Declaration Of Human Right yang menyatakan: Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.¹¹

- a. timbul dari persekusi sebelumnya atas penolakan untuk memanfaatkan perlindungan Negara kewarganegaraanya.
- b. Sebagai seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi, ia dapat kembali ke Negara di mana ia sebelumnya bertempat tinggal.

2. Pengertian Umum Pencari Suaka

Menurut Hukum Internasional suaka dan Pengungsi sebenarnya memiliki perbedaan. Seorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai

¹⁰Ibid, Hal 44

¹¹Ibid.

pengungsi, pertama-tama ia adalah seorang pencari suaka. Sebaliknya seorang pesuaka belum tentu merupakan seorang pengungsi.¹²

Pada awalnya kata suaka berasal dari bahasa Yunani yaitu “Asylon” atau “Asylum” dalam bahasa latin, yang artinya tempat yang tidak dapat dilanggar di mana seseorang yang dikerjar-kejar mencari tempat berlindung.¹³ Pada dasarnya belum ditemui adanya ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang bersifat umum yang menentukan status pesuaka, tidak ada yang menentukan secara hukum pengertian tentang suaka, sebagai pedoman kita dapat berpegang kepada pasal 1 paragraf 3 Deklarasi tentang Suaka Teritorial, yaitu yang berbunyi “Penilaian alasan bagi pemberian suaka adalah tanggung jawab Negara yang memberi suaka”.

Beberapa ahli mendefinisikan Pesuaka menjadi beberapa variabel yang berbeda:

a. Menurut Oppenheim

Oppenheim Lauterpacht mengatakan bahwa suaka adalah dalam hubungan dengan wewenang suatu Negara mempunyai kedaulatan diatas teritorialnya untuk memperbolehkan seorang asing memasuki dan tinggal di dalam wilayahnya dan atas perlindungannya.¹⁴

b. Menurut Prof. DR. F. Sugeng Istanto, SH.

¹² Sulaiman Hamid.2002, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo persada, Jakarta, Hal 40.

¹³ Ibid. Hal 42.

¹⁴ Ibid. Hal 45.

Prof. DR. F. Sugeng Istanto, SH. mengatakan bahwa asylum adalah perlindungan individu di wilayah Negara asing tempat ia mencari perlindungan. Asylum merupakan perlindungan Negara asing di wilayah Negara tersebut dikediaman perutusan asing atau dikapal asing. Dengan adanya perlindungan itu Individu tersebut tidak dapat diambil oleh penguasa Negara lain.¹⁵

B. Solusi Pasifik

1. Pembentukan Solusi Pasifik oleh pemerintah Australia

Australia merupakan Negara yang termasuk favorit untuk didatangangi oleh pencari suaka, baik itu adalah pencari suaka murni maupun pencari suaka kemudian berubah statusnya menjadi pengungsi yang karena persekusi di Negara asalnya kemudian mencari perlindungan di Negara lain. Pada dasarnya pencari suaka yang datang ke Australia dapat melalui udara dan melalui kapal (*boat people*). Pemerintah Australia melalui *Department Immigration and Citizenship* (DIAC) memutuskan bahwa keberadaan pencari suaka yang datang menggunakan perahu tersebut dianggap sebagai imigran ilegal dan selanjutnya disebut sebagai *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs). Dalam menanggapi peningkatan jumlah kedatangan perahu pada tahun 2001, pemerintahan John

¹⁵Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbit Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta. Hal 146

Howard memperkenalkan apa yang disebut dengan solusi pasifik¹⁶ Kebijakan tersebut dirancang oleh pemerintah John Howard, Solusi Pasifik diperkenalkan dalam menanggapi peristiwa bulan agustus ketika 433 pencari suaka tenggelam dalam perjalanan menuju Australia, dan diselamatkan oleh sebuah kapal barang Norwegia yang bernama Tampa, Tampa menolak masuk ke Australia. Meskipun akhirnya menentang dan masuk ke wilayah Australia dan kemudian terindikasi oleh konvoi pasukan SAS dari Australia, dan kemudian pencari suaka ditransfer ke pulau-pulau di samudra pasifik dan Nauru.¹⁷ Solusi Pasifik diterapkan oleh Menteri Imigrasi Australia Philip Ruddock pada tanggal 28 September menjelang pemilu federal 2001 tanggal 24 November.¹⁸ Kebijakan yang diberlakukan selama 2001–2007 ini didukung oleh pemerintah Partai Liberal-Nasional dan oposisi Partai Buruh pada waktu itu¹⁹

2. Penerapan Solusi Pasifik oleh Pemerintah Australia.

Menghadapi semakin banyaknya *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs) yang datang ke Australia, Pemerintah John Howard segera menerapkan Solusi Pasifik yang dijalankan oleh Menteri Imigrasi Australia Philip Ruddock. Solusi pasifik adalah kebijakan yang dibuat untuk mencegah pencari suaka yang berfikir ingin membayar penyelundup manusia untuk membawa mereka ke Australia, sebagian besar dari

¹⁶http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2012-2013/PacificSolution. Di akses pada 1 April 2015

¹⁷http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2012-2013/Detention. Di akses pada 1 April 2015.

¹⁸http://id.wikipedia.org/wiki/Solusi_Pasifik, Diakses pada tanggal 24 september 2014

¹⁹http://id.wikipedia.org/wiki/Solusi_Pasifik, Diakses pada tanggal 24 september 2014

Indonesia. Memang, sebenarnya setiap aspek dari kebijakan perlindungan perbatasan Australia, setelah peristiwa Tampa bulan Agustus 2001, dibentuk dalam rangka pengiriman pesantapa tanpa kompromi kepada para penyelundup yang daftar tujuan prospektifnya seharusnya dicoret oleh Australia. Ini berarti memberitahu pencari suaka yang memang datang bahwa mereka akan diperlakukan secara berbeda dari para pengungsi yang dipilih untuk datang ke Australia sebagai bagian dari program kemanusiaan di Negara ini.²⁰ Secara khusus, ini berarti memberitahu mereka bahwa mereka akan selalubersifat sementara, bahwa mereka tidak akan pernah bisabersatu kembalidengan anggotakeluarga dekat, dan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk hidup di Australia, bahkan dengan visa perlindungan sementara.

Solusi Pasifik terdiri dari tiga Strategi Utama:

- a. Ribuan pulau dikeluarkan dari zona migrasi Australia atau teritori Australia.
- b. Australian Defence Force memulai Operasi Relex untuk mencegah kapal-kapal yang mengangkut pencari suaka.
- c. Pencari suaka dipindahkan ke pusat detensi di Nauru dan Papua Nugini sambil menunggu kepastian status pengungsi mereka.²¹

Solusi Pasifik merupakan sarana pengolahan lepas pantai yang didirikan oleh Australia. Sarana pengolahan lepas pantai didirikan di dua Negara, Nauru dan Papua Nugini. Fasilitas ini merupakan kerjasama antara

²⁰Lusher dean, nick haslan. 2007. *Yearning For Breath Free: seeking for assylum in Australia*. The Federation Press. Australia. Hal 75.

²¹http://id.wikipedia.org/wiki/Solusi_Pasifik, Diakses pada tanggal 24 september 2014

pemerintah Papua Nugini dan pemerintah Nauru. Pencari suaka tidak ditahan berdasarkan hukum Australia, ataupun hukum Nauru atau Papua Nugini, tujuan khusus Negara-Negara tersebut bukanlah memberikan visa tetapi memfasilitasi pencari suaka untuk tinggal sementara sambil menunggu proses dan transmigrasi atau kembali ke Negeranya.²²

Mayoritas orang yang terakomodasi di Nauru dan Pulau Manus tiba pada akhir 2001 dan awal 2002 (hanya 3 orang yang tiba pada awal 2003 dan 90 lainnya di tahun 2006-2007). antara 2001 dan 2003 selama Solusi Pasifik mencapai puncaknya, total ada 1544 Pencari Suaka yang diakomodasi (kebanyakan dari Afganistan dan Irak) dan puncaknya yaitu 1515 pada bulan februari 2002. Pada bulan september 2003 hanya tersisa 335 Pencari Suaka di Nauru, meskipun kemudian ada transfer Pencari Suaka dari Pulau Christmas pada 2006-2007. dan tak satu pun yang tersisa di pulau Manus.²³ Pada bulan April 2002, total populasi di pusat pengolahan Nauru dan Manus adalah 1511 (dibawah puncak populasi dua bulan sebelumnya yaitu 1515). itu termasuk didalamnya 125 perempuan, 213 anak-anak dan 30 anak dibawah umur yang terdapat di nauru. dan 65 perempuan dan 125 anak-anak dikepulauan Manus, kemudian ada 19 bayi yang lahir di kepulauan Manus antara tahun 2001-2003.²⁴

²²http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2012-2013/PacificSolution. Diakses pada 13 April 2015.

²³http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2012-2013/PacificSolution. Diakses pada 13 April 2015.

²⁴http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2012-2013/PacificSolution. Diakses pada 13 April 2015.

Pusat detensi dan pengolahan lepas pantai yang didirikan di Nauru dan Pulau Manus menghasilkan beberapa klaim terhadap manusia perahu tersebut. Dari beban kasus asli Nauru, 274 orang dimukimkan kembali ke Negara-Negara selain Australia (sebagian besar di Selandia baru), 22 orang sebagai pengungsi, 49 orang tanpa status pengungsi, 484 orang dimukimkan kembali ke Australia, 455 orang sebagai pengungsi, 29 dengan visa kemanusiaan, 425 orang menerima paket pemulangan sukarela, melibatkan pembayaran sebesar \$ 2000 per individu dan \$ 10,000 per keluarga dan 48 kembali ke Negara asal mereka tanpa menerima paket pemulangan sukarela.

3. Berakhirnya Solusi Pasifik

Pada tanggal 24 November 2007, Partai Buruh memenangkan pemilu federal dan Kevin Rudd dilantik sebagai Perdana Menetri Australia ke 26 pada tanggal 3 Desember 2007 menggantikan Perdana Menteri sebelumnya John Howard. Pada membentuk Pemerintah, ALP (Partai Buruh) membuat beberapa perubahan signifikan terhadap kebijakan penahanan PencariSuaka dan Imigrasi, ini merupakan wujud dari komitmen selama kampanye pemilu. Pada tanggal 8 Februari 2008 Solusi Pasifik secara resmi berakhir, karena pemrosesan 21 pencari suaka terakhir diadakan di Processing Centre Lepas Pantai (OPC) di Nauru dipindahkan ke Australia. Pemerintah Rudd mengumumkan bahwa pusat pemrosesan di Manus dan Nauru tidak lagi digunakan sekarang dan kedepannya. Kedatangan kapal yang tidak sah yang membawa

pencarisaaka akan diproses di Pulau Christmas, yang akan tetap dipotong dari zona migrasi Australia.²⁵

C. Penerapan kebijakan Solusi Pasifik oleh pemerintah Australia dalam mengendalikan kedatangan Pengungsi dan Pencari Suaka ditinjau dari Hukum Internasional

Australia adalah Negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang status Pengungsi. Ratifikasi adalah perbuatan hukum suatu Negara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, akses penerimaan, atau persetujuan.²⁶ Dalam konteks berarti Australia harus patuh dan mengikatkan diri terhadap segala prosedur-prosedur yang terkandung di dalam Konvensi Jenewa 1951 sebagai bukti keterikatan dari proses ratifikasi. Sebagai Negara yang telah meratifikasi tentu memiliki konsekuensi yang harus ditanggung oleh Australia berkaitan dengan perlindungan terhadap Pengungsi Internasional, Australia harus memenuhi segala hak-hak dasar Pengungsi pada saat mendapatkan Perlindungan dan adanya larangan melakukan pengusiran terhadap pengungsi atau disebut sebagai Refoulment.

Pada tahun 2001 Pemerintah Australia mengeluarkan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan keimigrasian yang bernama Solusi Pasifik. Solusi Pasifik adalah kebijakan yang dikeluarkan guna mencegah

²⁵http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/1311498/upload_binary/1311498.pdf;fileType=application/pdf. Di akses pada 15 April 2015.

²⁶Eddy Pratomo, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung. Hal 270.

masuknya *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs) atau lebih sempitnya Pemerintah Australia menyebutnya sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi tidak sah untuk menapakan kaki di daratan Australia dan memindahkannya di pusat detensi yang terletak di Nauru dan Papua Nugini untuk di proses.

Dalam Hukum Internasional yang berlaku pada saat ini maupun hukum kebiasaan, kasus Solusi Pasifik dinilai kurang tepat. Sigit Riyanto berpendapat bahwa dalam kasus Solusi Pasifik tersebut disebutkan adanya Pencari Suaka dan Pengungsi tidak sah pada dasarnya tidak ada, karena mereka hanyalah korban pelanggaran HAM dan dalam keadaan persekusi, harus dibedakan antara Imigrasi normal dengan Pencari Suaka dan Pengungsi, apabila Imigrasi normal memang harus membawa dokumen-dokumen perjalanan yang sah, tetapi jika Pencari Suaka dan Pengungsi haruslah mendapat pengecualian dari Imigrasi normal.

Australia sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dalam konteks penerapan Solusi Pasifik dapat dipersalahkan, karena dianggap tidak patuh terhadap Asas *Non Refoulement* yang terkandung di dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951. Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 menyebutkan bahwa, “Tidak ada pihak yang akan mengusir atau mengembalikan pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini

politiknya”.²⁷ Asas Non Refoulement adalah merupakan tulang punggung Hukum pengungsi Internasional dan berkaitan dengan prinsip perlindungan serta HAM. Dalam Konvensi Jenewa 1951 Negara penerima memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi dan memproses permohonan status pengungsi tersebut.²⁸ Menurut Sigit Riyanto Pengungsi dan Pencari Suaka yang masuk ke wilayah Australia seharusnya sebagai negara yang telah meratifikasi wajib menolong atau memproses status pengungsi dan memberikan bantuan kemanusiaan, apabila tidak memproses status pengungsi tersebut maka dapat dianggap melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1951.²⁹ Australia seharusnya mengizinkan pengungsi dan pencari suaka tersebut masuk ke Negaranya untuk mendapatkan perlindungan, dalam kasus Solusi Pasifik ini Australia dianggap ingkar terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan tidak sesuai dengan kebiasaan Internasional.³⁰

Pengungsi dan pencari suaka yang meminta perlindungan harus di proses di wilayah Negara yang dituju oleh pengungsi dan pencari suaka tersebut, pengungsi dan pencari suaka tidak boleh di alihkan atau di “pingpong” ke Negara-Negara lain karena tidak ada jaminan perlindungan yang mengikat. Pemrosesan yang tidak jelas atau dialihkannya ke Negara ketiga menimbulkan akibat yang tidak tertentu, secara normatif melanggar hukum pengungsi Internasional dan secara praktis

²⁷Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951

²⁸Hasil wawancara dengan Prof. Sigit Riyanto pada tanggal 19 Mei 2015

²⁹Hasil wawancara dengan Prof. Sigit Riyanto pada tanggal 19 Mei 2015

³⁰Hasil wawancara dengan Prof. Sigit Riyanto pada tanggal 19 Mei 2015

menimbulkan pelanggaran yang lebih berat karena membahayakan nyawa pencari suaka.³¹

Tindakan Australia dalam penerapan Solusi Pasifik tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam deklarasi umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, *article* 14 menyebutkan bahwa:

- 1) *Everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum for persecution;*
- 2) *This right may not be invoked in the case of prosecution genuinely arising from non political crime or acts contrary to the purpose and principles of the United Nations.*

Dari uraian pasal 14 DUHAM tersebut nampaklah bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menikmati suaka di Negara lain dan mereka bebas dari ancaman persekusi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemberian ijin masuk bagi para pencari suaka serta perlakuan yang diberikan kepada mereka merupakan hal yang penting dari sistem hukum internasional bagi perlindungan terhadap pencari suaka.³² Hak untuk mencari suaka mengandung pengertian bahwa orang-orang yang melarikan diri dari persekusi dan masuk ke wilayah Negara lain tanpa membawa dokumen yang lengkap harus diberi ijin

³¹Hasil wawancara dengan Prof. Sigit Riyanto pada tanggal 19 Mei 2015

³²Atik Krustiyanti, Loc Cit. Hal 25

masuk ke suatu Negara, minimal untuk jangka waktu sementara. Hal ini merupakan salah satu komponen penting dalam lembaga suaka, yakni prinsip Non refoulment, prinsip ini sama dengan prinsip yang berlaku dalam hukum pengungsi yang dalam garis besarnya melarang Negara-Negara mengusir atau mengembalikan mereka ke Negara asalnya.³³ Larangan pengusiran terhadap pencari suaka secara jelas juga diatur di dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Suaka Territorial Pasal 3 yang menyebutkan bahwa, “ Tidak ada seorangpun dari orang-orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, ayat 1 yang boleh dikenai tindakan seperti penolakan di perbatasan atau, jika ia telah memasuki wilayah tempat ia mencari suaka, pengusiran atau pengembalian ke Negara manapun yang mungkin menjadikannya sasaran persekusi”.

Solusi Pasifik merupakan bentuk dinamika politik suatu Negara dan hak proregatif negara. Sigit Riyanto berpendapat bahwa kebijakan Solusi Pasifik adalah bentuk ketidak inginan Australia untuk memproses pengungsi dan pencari suaka, oleh sebab itu Australia mengeluarkan *Imigration Zon* terhadap para pengungsi dan pencari suaka, sehingga Australia menjadi tidak berwenang memproses karena pengungsi dan pencari suaka berada diluar wilayah Australia.

³³Ibid.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasar rumusan masalah dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan Solusi Pasifik oleh Pemerintah Australia dalam mengendalikan laju kedatangan Pengungsi dan Pencari Suaka bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam hukum Internasional.

Pada dasarnya pemerintah Australia sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951, memiliki kewajiban untuk memproses dan melindungi setiap pengungsi yang datang untuk mencari perlindungan di Negaranya. Dalam menerapkan Solusi Pasifik pemerintah Australia mencegah pencari suaka dan pengungsi yang akan menapakkan kaki di daratan Australia dan memindahkannya ke Pusat detensi di Nauru dan Papua Nugini. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Australia dinilai berbanding terbalik terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai bentuk konsekuensi negara apabila sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 khususnya penerapan Solusi Pasifik bertentangan dengan pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 yang secara jelas menyebutkan bahwa adanya larangan dilakukannya pengusiran dan penolakan terhadap pengungsi yang meminta perlindungan atau lebih dikenal sebagai asas Non Refoulement. Australia juga dinilai berbanding terbalik dengan Pasal

14 DUHAM. Di dalam DUHAM pasal 14 tersebut nampaklah bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menikmati suaka di Negara lain dan mereka bebas dari ancaman persekusi, larangan pengusiran terhadap pencari suaka secara jelas juga disebutkan di dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Suaka Teritorial Pasal 3. Selain itu Australia juga dianggap melanggar hukum kebiasaan Internasional yang juga selalu melekat di dalam perlindungan dan pemberian status terhadap pengungsi dan pencari suaka.

B. Saran

Permasalahan Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka adalah merupakan masalah dari masyarakat internasional dan selalu akan berkaitan dengan ketentuan hukum Internasional.

Australia sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Jenewa 1951 dalam hal ini seharusnya mematuhi aturan-aturan yang terkandung di dalam Konvensi tersebut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka. Dalam hal ini Australia harus memproses pencari suaka dan pengungsi di wilayah teritorialnya guna menghindari pelanggaran kemanusiaan yang lebih berat yang diakibatkan pemindahan pencari

suaka dan pengungsi ke Negara ketiga, hal ini jelas beresiko dan dapat membahayakan nyawa pengungsi dan pencari suaka.

